

---

## Evaluasi Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akruwal Pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat

<sup>1</sup>Syifa Fadhilatunnisa, <sup>2</sup>Ai Siti Farida

<sup>1</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; efsyifa05@gmail.com  
<sup>2</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; aisitifarida@uinsgd.ac.id

### Abstract

This study aims to evaluate the implementation of the Accrual Based Agency Accounting System at the West Java Province Forestry Service in 2016-2019 as an implementation of the Accrual Based Government Accounting Standards. Evaluation of SAIBA applications used includes: Technical Feasibility, Operational Feasibility and Economic Feasibility are the theories of Bambang Hartono (2013). Descriptive qualitative research methods, data collection techniques with observation, documentation, interviews, and triangulation, and data analysis techniques using Miles and Huberman model analysis consisting of (1) data reduction, (2) data presentation, and (3) drawing conclusions/verification. Based on the results of the study that the results of the analysis showed an evaluation of the application of the Accrual Based Institution Accounting System (SAIBA) in the West Java Provincial Forestry Work Unit based on the evaluation of the Management Information System (SIM) application, (1) the technical feasibility of the SAIBA application measured in two indicators namely easy technology and low-cost technology shows that the SAIBA application has been quite successful, (2) the operational feasibility of the SAIBA application related to the evaluation of the SIM application has been running quite well when viewed in terms of timely reporting and accepted by the KPPN, but there are other things related to the output indicators are successful namely regarding the budget realization report, which before using the SAIBA report reached the target of 100%, but after using SAIBA there was a decrease in the achievement of the target which was between 70-90%, (3) economic feasibility, where costs and benefits were comparable.

**Keywords:** Local Government, Institution, Accounting Standards, Policy Evaluation

### Pendahuluan

Reformasi pengelolaan keuangan negara di Indonesia dimulai sejak tahun 2003 dan berlanjut hingga saat ini. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, hal tersebut bisa dijadikan acuan adanya reformasi pengelolaan keuangan di Indonesia. Setelah undang-undang tersebut, kemudian muncul beberapa peraturan pemerintahan yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam hal keuangan. Salah satu peraturan pemerintah yang muncul adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 yang menetapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akruwal yang menggantikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang masih bersifat sementara yang mengatur penerapan SAP berbasis kas menuju akruwal (*cash toward accrual*). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis kas menuju akruwal (CTA) ini berlaku hanya selama masa transisi untuk entitas atau lembaga yang belum siap dalam menerapkan SAP berbasis akruwal dengan jangka waktu maksimal 5 (Lima) tahun dari tahun anggaran 2010, maka batas waktunya hingga tahun 2015. Meskipun masih diperbolehkan untuk menerapkan sistem CTA tersebut, namun pemerintah/lembaga/kementerian diharapkan harus segera menerapkan SAP berbasis akruwal.

Pergantian Standar Akuntansi Pemerintah berbasis kas menuju akrual (CTA) kepada basis akrual (SAIBA) ini disebabkan karena banyaknya kekurangan pada sistem CTA. Kekurangannya yaitu laporan keuangan yang dihasilkan tidak memperlihatkan pengeluaran sebenarnya, karena hanya mencatat belanja pada laporan realisasi anggaran dan tidak mencatat beban atau biaya, didalam CTA juga tidak menghasilkan rekam jejak atau perubahan nilai ekuitas yang disebabkan setiap transaksi yang berkaitan dengan aset dan kewajiban mempengaruhi ekuitas tersebut, selanjutnya CTA juga tidak menghasilkan laporan yang menunjukkan kinerja operasional pemerintah, di dalam laporan realisasi anggarannya hanya menghasilkan informasi mengenai pelaksanaan anggaran. Dikatakan dalam (Suwanda, 2018) dengan adanya Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual sangat tepat untuk menghasilkan laporan keuangan yang sempurna dan lebih lengkap untuk menilai kinerja suatu pemerintahan. Dimana dalam basis akrual ini menghasilkan laporan keuangan diantaranya, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, neraca dan catatan atas laporan keuangan.

Sebelum adanya peraturan pemerintah mengenai Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (*Basis accrual*), pemerintah menggunakan sistem akuntansi tata buku tunggal (*single entry accounting system*) berbasis kas (*Basis Cash*). Sistem pencatatan *single entry* (*sakpa*) ini sederhana, dimana sistem tersebut hanya mencatat satu kali setiap adanya transaksi. Dicatat di penerimaan jika transaksi yang dilakukan menyebabkan kas bertambah dan akan dicatat di pengeluaran jika transaksi menyebabkan kas berkurang. Sistem *single entry* ini sangat sederhana dan mudah dipahami, namun dalam sistem ini juga banyak sekali kekurangan, maka dari itu pemerintah dituntut untuk memperbaiki sistem tersebut. Sehingga terbentuklah suatu sistem baru dari perbaikan sistem lama untuk pelaporan keuangan yang baik yaitu Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA). Sistem ini mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan pemerintahan berupa laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*). Sistem SAIBA ini mengelola laporan keuangan anggaran pusat yaitu mengenai anggaran APBN. Sistem yang baru (SAIBA) ini mempunyai karakter yaitu basis akrual dan *double entry*. Sistem ini akan menghasilkan informasi kepada para pengguna laporan keuangan tidak hanya tentang penerimaan dan pengeluaran dari transaksi periode sebelumnya akan tetapi juga mengenai kewajiban yang harus dipenuhi serta perkiraan penerimaan kas dimasa yang akan datang. Secara umum sistem akuntansi berbasis akrual ini lebih akuntabel jika dibandingkan dengan basis kas, karena dengan menggunakan sistem ini dapat diperoleh informasi mengenai dana secara wajar pada akhir periode. Basis akrual ini juga memenuhi tuntutan mengenai dasar akuntansi dalam laporan keuangan, namun karena sistem ini baru dan harus adanya adaptasi dan perubahan baik dari segi sumber daya manusia maupun teknologinya maka sistem ini diterapkan secara bertahap melalui beberapa proses transisi.

Dalam penerapan SAIBA ini diperlukan kehati-hatian dengan persiapan yang matang dan lebih terstruktur, mengenai regulasi sitem informasi, sumber daya manusia, infrastuktur serta sebuah komitmen dari pemimpin supaya penerapan sistem tersebut bisa menyukkseskan penerapan SAP dan akan menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 perihal Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual. Pemerintah Indonesia mengubah basis akuntansinya dari kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh. Sesuai dengan keputusan pemerintah dan DPR, pelaksanaan basis akrual ini dilakukan secara bertahap hingga batas waktu tahun 2015. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat telah menerapkan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) ini sesuai dengan peraturan yang ditetapkan yaitu pada Tahun 2015. Banyak kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem ini, diantaranya SDM dalam bidang akuntansi, Infrastruktur dan Komitmen dari pemimpin. Namun seiring berjalannya waktu hal ini bisa

teratasi dengan baik, baik itu dari segi SDM yang mampu mengendalikan sistem SAIBA, Infrastruktur yang memadai dan Komitmen dari Kepala Dinas Kehutanan yang mendukung dalam penerapan SAIBA. Pengimplementasian SAIBA ini sekarang baik meski ada sedikit kendala dalam pelaporan secara online nya, namun ini bisa teratasi dengan baik sehingga laporan keuangan bisa dihasilkan sesuai dengan peraturan SAP dalam penyusunan laporan keuangan APBN. (*Personal Communication*. 2017, November 20).

**Tabel 1**

**Hasil Rekonsiliasi T.A 2016-2019 Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat**

No	Periode	Perbedaan SIAP dan SAI	Status	Keterangan
1	2016	Tidak ada	Diterima	BAR Siap Download
2	2017	Tidak ada	Diterima	BAR Siap Download
3	2018	Tidak ada	Diterima	BAR Siap Download
4	2019	Tidak ada	Diterima	BAR Siap Download

(Sumber: Data Diolah Peneliti, 2019)

Ditinjau dari data tersebut, terlihat bahwa laporan keuangan Satuan Kerja Dinas Kehutanan dalam pelaporannya diterima dan tidak ada perbedaan. Dan dalam pengoperasian SAIBA berdasarkan wawancara awal dijelaskan bahwa tidak adanya masalah yang signifikan yang menghambat pengoperasian SAIBA dalam menunjang penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan bisa di sajikan dengan cepat dan tepat.

**Tabel 2**

**Rincian Opini BPK atas Kementerian Kehutanan**

No	Tahun	Opini BPK
1	2016	WDP (Wajar Dengan Pengecualian)
2	2017	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
3	2018	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (Data Diolah Peneliti, 2019)

Berdasarkan Tabel 2 juga terlihat bahwa penyajian laporan keuangan berdasarkan audit BPK terhadap Kementerian Kehutanan yang merekon seluruh laporan keuangan APBN hasil dari SAIBA termasuk Satuan Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan status WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Hal ini menunjukkan bahwa Satuan Kerja Dinas Kehutanan dalam menerapkan SAIBA telah berhasil.

Sebelum adanya SAIBA ini, pelaporan APBN disajikan secara manual, sehingga menghambat proses pelaporan yang membuat laporannya keteteran dan tidak tepat waktu, sehingga dengan adanya SAIBA ini memudahkan pengguna dalam pelaporan dan mengefektifkan waktu dan sangat berpengaruh terhadap reformasi pengelolaan keuangan yang baik. Berdasarkan fenomena tersebut mengenai keberhasilan Satuan Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dalam penggunaan SAIBA ini, maka penulis akan mencoba menjelaskan indikator keberhasilan penggunaan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual pada Satuan Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dari tahun 2016-2019, yang diharapkan bisa menjadi acuan untuk satuan kerja-satuan kerja lain yang belum berhasil dalam menerapkan SAIBA tersebut. Dan dalam penelitian ini, penulis akan mencoba membandingkan dengan

penelitian sebelumnya menggunakan studi literatur yang berguna untuk menelaah indikator-indikator keberhasilan yang dijadikan acuan untuk yang belum mencapai keberhasilan tersebut.

Ada beberapa alasan penelitian ini sangat penting untuk dilakukan, dimana SAIBA ini merupakan aplikasi dalam menunjang penyusunan laporan keuangan APBN yang baik, tepat waktu dan dapat diandalkan sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010. Laporan keuangan merupakan aspek penting dalam menunjang keberhasilan akuntabilitas keuangan. Mengacu pada teori menurut (Mahmudi, 2013) yang menyebutkan bahwa pertanggungjawaban tidak cukup dengan laporan lisan saja, namun perlu didukung dengan laporan secara tertulis. Penyajian laporan keuangan adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kinerja keuangan yang telah dicapai. Terkait dengan tugas dalam menegakkan akuntabilitas keuangan, berikut beberapa alasan pentingnya penelitian terkait keberhasilan SAIBA dalam menyajikan laporan keuangan dilakukan, yaitu: (1) Laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu *stakeholders* dalam membuat keputusan sosial, politik dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas, (2) Laporan keuangan yang disajikan memberikan informasi yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi, (3) Laporan keuangan merupakan hal vital dalam penilaian kinerja keuangan pemerintahan dan (4) Laporan keuangan ini sangat penting untuk menciptakan budaya transparansi dan akuntabilitas publik dalam rangka menciptakan *good governance*. Sebelumnya penelitian ini juga didasari dengan beberapa penelitian terdahulu dengan tema pembahasan yang sama yaitu terkait Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) yang dijadikan peneliti sebagai acuan dan penemuan suatu kebaruan dalam ilmu pengetahuan dan dalam penelitian.

Penelitian Iput Dyah Susanti, Muh. Ahyaruddin dan Muh. Hidayah, (Susanti et al., 2016) Jurnal Universitas Muhammadiyah Riau dengan Judul: "*Analisis Penerapan SAIBA dalam Penyajian Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada BNN Provinsi Riau)*". Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih terdapat beberapa kekurangan pada aplikasi SAIBA ini, karena aplikasi tersebut masih dalam proses transisi dan penyempurnaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam penerapan SAIBA untuk penyajian laporan keuangan. Analisis yang digunakan adalah analisis isi tematik menurut Cooper dan Schindler (2007) dalam Ahyaruddin (2015), yaitu sebuah analisis dalam teknik riset untuk menjelaskan tujuan, susunan dan banyaknya isi yang nyata dari suatu komunikasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang di olah menggunakan analisis deskriptif. Penerapan SAIBA pada BNN Provinsi Riau telah sesuai dengan prosedur PMK 270/PMK.05/2014 dari mulai migrasi saldo awal, perekaman dokumen sumber berupa DIPA dan perekaman dokumen transaksi belanja yang berupa SPP, SPM dan SP2D. Laporan keuangan yang dihasilkanpun telah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.

Penelitian Andi Kasfari dan Syukry Abdullah (Syukri, 2019) Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Universitas Syiah Kuala Aceh dengan judul: "*Implementasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) pada Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh*". Permasalahan dalam penelitian ini yaitu ketika penerapan awal terdapat kendala dalam analisis sistem yang bisa membaca setiap proses SAIBA dan kendala pada Sumber Daya Manusia yang berkompeten dibidang akuntansi. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui pelaksanaan penerapan SAIBA, dampak yang terjadi dan peluang sekaligus tantangan dalam penerapan SAIBA tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan teori *Technology Acceptance Model (TAM)*, yang meninjau implementasi SAIBA dari tiga indikator TAM diantaranya *perceived usefulness*, *perceived ease of use* dan *Behavioral Intention*. Teori TAM ini bertujuan untuk melihat penerimaan suatu sistem yang membuat pelaksanaan pekerjaan semakin mudah dan bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan penelitian ini menggunakan tingkat intervensi minimal, jadi

penelitian hanya berwenang sebagai pengumpul data tanpa melakukan pengaruh terhadap hasil dari penelitian. Hasil dari penelitian ini yaitu Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh dalam pelaksanaan SAIBA ini masih belum bisa dikatakan efektif, karena adanya suatu hambatan yang dipengaruhi oleh kemampuan SDM. Sebelumnya Balai Diklat tersebut selalu mengadakan sosialisasi dan pelatihan dalam menggunakan SAIBA namun hasilnya nihil, masih belum terkendalikannya pengaplikasian SAIBA tersebut.

Penelitian Anwar, Tenry dan Achmat Subekan (2016) dalam Jurnal Tata Kelola Akuntabilitas dan Keuangan Negara Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Indonesia dengan judul: Evaluasi atas Implementasi Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) pada Mitra Kerja KPPN Gorontalo dan Marisa. Tujuan Penelitian ini yaitu mengevaluasi keberhasilan penerapan aplikasi SAIBA yang telah berjalan pada KPPN tersebut berdasarkan sudut pengguna (*user*) dengan menggunakan pendekatan Delone dan Mclean *Information System Success Model*. Model ini menggunakan enam variable pengukuran adalah kualitas sistem, kualitas informasi, kepuasan pengguna, penggunaan sistem, dampak individu dan dampak organisasi. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif karena menguji teori yang sudah ada. Penelitian tersebut membuktikan secara empiris penerapan aplikasi SAIBA belum sukses dari keseluruhan.

Adapun perbedaan dan *novelty* dalam penelitian ini adalah teori yang digunakan dan tempat penelitian. Peneliti melakukan evaluasi aplikasi SAIBA dengan menggunakan teori evaluasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen menurut Bambang Hartono. Dimana penelitian ini sangat menarik untuk diteliti, karena setelah peneliti mencari dan membaca beberapa jurnal dan artikel belum menemukan penelitian yang tertuju pada penilaian aplikasinya dengan menggunakan teori tersebut, sehingga diharapkan bisa menjadi sebuah kebaruan dalam ilmu pengetahuan. Oleh karena itu untuk mengetahui aspek keberhasilan pelaksanaan aplikasi SAIBA menggunakan teori evaluasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen dari Bambang Hartono (2013). Bambang menyebutkan bahwa ada 3 dimensi dari evaluasi aplikasi SIM adalah sebagai berikut (Hartono, 2013):

1. Kelayakan Teknis
2. Kelayakan Operasional
3. Kelayakan Ekonomi

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Marshall Edward Dimock dan Gladys Ogden Dimock (1969) dikutip dalam (Syafri, 2012) “administrasi publik ialah penyelenggaraan pencapaian tujuan yang ditetapkan secara politis. Meskipun demikian, administrasi publik bukan sekedar teknik atau pelaksanaan program-program secara teratur, melainkan juga berkenaan dengan kebijakan umum (*policy*) karena di dalam dunia modern, birokrasi merupakan pembuat kebijakan pokok di dalam pemerintahan.”

Kemudian dalam administrasi publik adanya suatu bidang yang harus dikelola yaitu administrasi keuangan yang didalamnya membahas mengenai asas keuangan Negara yang termasuk pengelolaan keuangan yang menghasilkan suatu laporan atau hasil pertanggung jawaban dalam bentuk laporan keuangan. Dikutip dari (Anggara, 2016) dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan Negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian dalam menunjang reformasi pengelolaan keuangan yang terbaru yaitu menuju *good governance*, dalam penyajian laporan keuangan tersebut harus lebih baik dan dapat memberikan kemudahan dan efektif dalam hal pengerjaan yaitu dengan adanya suatu alat informasi bagi pemerintah maupun publik. “Akuntansi sektor publik menurut Mardiasmo merupakan alat informasi baik

bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi public. Dalam akuntansi sector publik ini mencakup beberapa hal yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan.”(Mardiasmo, 2009)

Standar akuntansi pemerintahan merupakan acuan pokok dalam menunjang sistem informasi pemerintah menjadi lebih baik dan dapat menunjang dalam reformasi pengelolaan keuangan. Seperti yang dikutip dalam (Bastian, 2010) menyatakan bahwa dalam hal laporan keuangan, pemerintah memberikan peraturan mengenai pelaporan keuangan yang harus berbasis akrual. Tujuannya agar mempermudah pelaporan dan penilaian hasil pertanggung jawaban yang tertera pada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. Untuk pemerintah pusat, proses pelaporan menggunakan aplikasi SAIBA untuk menunjang keberhasilan suatu pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Evaluasi Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) Pada Satuan Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ini digunakan peneliti karena relevan dengan permasalahan yang terjadi, hal ini sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan kejadian yang terjadi saat ini secara actual dan mendalam, yang berkaitan dengan keberhasilan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data hasil wawancara, observasi data dan aplikasi yang peneliti gunakan ini bertujuan untuk meninjau evaluasi dari keberhasilan penerapan dan pelaksanaan sistem SAIBA. Dengan metode kualitatif dapat mengungkapkan keberhasilan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dalam penerapan dan pelaksanaan sistem SAIBA ditinjau dari kelayakan teknis, kelayakan operasional dan kelayakan ekonomisnya.

Penelitian dilakukan di Satuan kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Penelitian dilakukan pada Januari hingga April tahun 2020 dengan menggunakan pedoman wawancara sebagai instrument penelitian. Adapun objek penelitian ini adalah aplikasi SAIBA pada fasilitas kantor maupun pada laptop peneliti yang sudah terinstal. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara, observasi, dan studi literature. Observasi yang dilakukan peneliti untuk memperoleh gambaran langsung terkait pelaksanaan SAIBA di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, dan untuk mendapatkan data-data sekaligus informasi langsung terkait pelaksanaan SAIBA tersebut. Adapun untuk informan wawancara dilakukan dengan 3 orang yang berkaitan langsung dengan SAIBA, dengan rincian sebagai berikut: (1) Penanggung Jawab/pengelola SAIBA, (2) Operator SAIBA dan (3) Bendahara Pengeluaran. Sedangkan adapun studi literatur yang digunakan dalam penelitian ini berupa data laporan hasil rekonsiliasi, laporan realisasi anggaran, SK pengelola SAIBA serta buku-buku, jurnal atau dokumen lain terkait dengan SAIBA. Dalam teknik analisis data, peneliti menggunakan teori model Miles dan Huberman yang menyebutkan bahwa data kualitatif ini dianalisis secara terus menerus dan interaktif sampai datanya jenuh atau selesai. Teori ini terdapat tiga proses yang digunakan yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Kemudian peneliti juga menggunakan triangulasi dalam menguji validitas data dan hasil penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan analisis terhadap hasil wawancara maka hasil penelitian atas dimensi kelayakan teknis dengan indikator teknologi mudah, teknologi murah dan teknologi cepat pada narasumber sekaligus hasil analisis peneliti dalam menggunakan aplikasi SAIBA, sebagai berikut: Teknologi yang mudah, teknologi yang murah dan teknologi cepat merupakan teknologi yang ada pada saat ini, mengapa demikian karena pada jaman sekarang teknologi sudah dapat diakses oleh siapa saja dan dimana saja. Dilihat dari teknologi yang ada saat ini, Aplikasi SAIBA dapat dijalankan dengan baik dan cepat. Selain karena kecanggihan teknologi zaman sekarang, hal lainnya yaitu mengenai aplikasinya sendiri yang *flexible* dan mudah dioperasikan, bisa di instal dimana saja dan kapan saja. Baik komputer, laptop yang speknya kecil sampai speknya besar ini dapat di instal dan digunakan. Dan dalam pelaksanaan pelaporan pun itu dapat cepat merespon aplikasinya. Dengan demikian peneliti dapat menyimpulkan bahwa Evaluasi Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) Pada Satuan Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat berdasarkan dimensi kelayakan teknis ini sudah baik dan dapat dikatakan berhasil karena telah mencakup 3 indikator yaitu teknologi yang mudah, teknologi yang murah dan teknologi cepat berdasarkan pendapat pengelola dan pengguna yang lebih tau dalam pelaksanaan.

Keberhasilan Sistem Informasi Manajemen dalam mengevaluasi keberhasilan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual yaitu dengan menilai dari kelayakan operasional yang ditujukan untuk penilaian aplikasi, dimana penilaian tersebut berguna dalam memeriksa apakah data yang diperlukan sebagai masukan dapat disediakan dan apakah keluaran/hasilnya berguna atau dapat digunakan, sedangkan pada saat aplikasi sudah dijalankan, penilaian dilakukan untuk memeriksa seberapa bagus kinerja aplikasi tersebut. Khususnya terkait dengan proses masukannya, banyaknya kesalahan, ketepatan waktu dihasilkannya keluaran dan kegunaan dari keluaran tersebut.

Berdasarkan analisis terhadap hasil wawancara dan data sekunder maka hasil penelitian atas dimensi kelayakan operasional dengan indikator output berhasil guna dan tepat waktu pada narasumber sebagai berikut: Output berhasil guna dan tepat waktu merupakan indikator dalam mengukur keberhasilan dalam evaluasi aplikasi SAIBA pada Satuan Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dimana berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber bahwa telah diketahui mengenai keberhasilan dengan dimensi kelayakan operasional dengan indikator output berhasil guna dan tepat waktu ini data dikatakan memang sudah berhasil, aplikasi SAIBA yang digunakan telah sesuai dan telah memenuhi indikator pengukuran kelayakan yang dijadikan sebagai bahan evaluasi keberhasilan penggunaan aplikasi SAIBA pada Satuan Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dimana dalam ketepatan waktu itu sudah diatur yaitu setiap tanggal 7 perbulan, satker harus sudah pelaporan SAIBA ke e-rekon yang dibuktikan dengan data awal jika laporan SAIBA pada Satker Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat telah diterima. Sedangkan untuk output berhasil guna juga dibuktikan berdasarkan opini dari pengawas dengan memberikan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) kepada Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku induk dari laporan satker Dinas Kehutanan Provinsi Jawa barat. Keberhasilan tersebut juga didukung oleh faktor SDM yang berdedikasi dan terlatih dengan baik dengan diadakannya pelatihan menjadi faktor yang sangat membantu dalam peningkatan kualitas SDM yang selaku pengguna langsung pada pengoperasian aplikasi SAIBA. Berdasarkan penjelasan diatas yang menyatakan bahwa indikator kelayakan operasional ini telah berhasil dengan berbagai faktor pendukung salah satunya adalah laporan keuangan yang berhasil, namun jika dibandingkan dengan sebelum menggunakan SAIBA dilihat pada akun realisasi anggarannya. Bahwa adanya temuan yang menyatakan penyerapan anggarannya menurun setelah menggunakan SAIBA.

**Tabel 3**  
**Realisasi Anggaran Belanja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat**

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	Realisasi Di Atas (Bawah) Anggaran	Persentase
1	2018	2.381.780.000	1.877.897.000	(503.883.000)	78.84 %
2	2019	1.394.680.000	1.213.550.000	(181.130.000)	87.01 %

Sumber: Laporan Realisasi Belanja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, 2019

Berdasarkan pernyataan wawancara yang didukung oleh data laporan realisasi anggaran diatas, peneliti dapat menganalisis dan menyimpulkan bahwa dapat dikatakan walaupun SAIBA ini telah berhasil namun adanya temuan dalam indikator output berhasil guna yaitu mengenai penyerapan anggaran yang menurun setelah menggunakan SAIBA ini. Peneliti lebih memperdalam kembali observasi dan analisis terkait indikator output berhasil guna yang kurang optimal melihat dari data laporan realisasi anggaran yang sebenarnya belum mencapai target anggaran. Peneliti mulai menganalisis terkait hal tersebut bahwa penurunan ini dikarenakan kompetensi pegawai atau pelaksana anggaran APBN yang kurang kompeten dalam merealisasikan anggaran yang telah diputuskan, dan kurangnya pengawasan langsung terkait anggaran dan realisasi dari anggaran tersebut, sehingga ini harus dievaluasi kembali agar penyerapan anggarannya bisa kembali seperti sebelum menggunakan SAIBA yaitu mencapai target 100%. Jika penyerapan anggarannya kembali mencapai target keberhasilan maka penggunaan aplikasi SAIBA sekaligus pegawainya ini memang sangat mendukung baik dalam penyajian laporan maupun anggaran dilapangannya. Sehingga menjadi suatu kesatuan dalam memenuhi akuntabilitas publik dan keberhasilan penggunaan sekaligus laporan keuangan di Satuan Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan analisis terhadap hasil wawancara maka hasil penelitian atas dimensi kelayakan ekonomis dengan indikator biaya dan manfaat pada narasumber sebagai berikut: Manfaat dan biaya merupakan indikator dalam mengukur keberhasilan aplikasi SAIBA melalui dimensi kelayakan ekonomis. Dimana berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini di jelaskan bahwa, dalam penggunaan aplikasi SAIBA ini mengenai indikator biaya menyebutkan bahwa tidak ada biaya signifikan dalam penggunaan aplikasi SAIBA ini dan jika ada itu sudah masuk ke dalam anggaran Dinas, jadi tidak ada anggaran khusus dalam pengelolaan SAIBA kecuali honor pegawai itu berbeda dari honor Dinas. Jadi dapat dikatakan biaya yang dikeluarkan tidak terlalu menghambat atau penyebab tidak bisa digunakannya aplikasi ini, karena sudah jelas berdasarkan hasil wawancara, biaya tidak terlalu berat dalam pengaplikasian SAIBA. Dan dalam indikator manfaat berdasarkan wawancara dijelaskan bahwa, manfaat yang dihasilkan sangat berguna dan sangat besar manfaatnya dalam proses penyajian laporan.

Dengan adanya aplikasi SAIBA ini sangat membantu pengguna dalam penyajian laporan keuangan, karena dalam penggunaannya aplikasi SAIBA ini sangat mudah, murah dan cepat sehingga aplikasi ini dapat dikatakan mempunyai manfaat yang banyak dan sangat membantu proses akuntabilitas pada Satuan kerja. Sehingga jika dibandingkan antara biaya dan manfaat ini sangat jelas, bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang dihasilkan, bahkan dapat dikatakan pula manfaat ini jauh lebih besar manfaatnya dibandingkan atas biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan manfaat tersebut. Dan dapat disimpulkan bahwa indikator manfaat dan biaya pada dimensi kelayakan ekonomis ini sudah membuktikan bahwa evaluasi aplikasi SAIBA pada Satuan Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat telah berhasil dan sukses.

## Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan didasari analisis data hasil observasi beserta temuan-temuannya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Evaluasi Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) pada Satuan Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019 yaitu, berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Bambang Hartono yang memuat tiga dimensi dan enam indikator dapat ditarik kesimpulan bahwa : (1) Kelayakan teknis dalam menilai evaluasi aplikasi SAIBA dalam menunjang pelaporan APBN telah berhasil dengan dua indikator penilaian kelayakan aplikasi yaitu indikator teknologi mudah dan teknologi murah. Keduanya telah menunjang dan memadai dalam hal evaluasi aplikasi yang baik. (2) Kelayakan Operasional dengan dua indikator penilaian evaluasi aplikasi ini diantaranya tepat waktu dan output berhasil guna. Indikator tepat waktu telah terpenuhi dan berhasil, namun untuk output berhasil guna belum optimal. Karena berdasarkan hasil perbandingan Laporan Realisasi Anggaran setelah SAIBA dengan sebelum SAIBA ini belum mencapai target yang ditentukan sebelumnya. (3) Kelayakan ekonomis juga memiliki dua indikator, yaitu biaya dan manfaat. Biaya dan manfaat dalam menunjang keberhasilan SAIBA ini sudah baik, karena manfaat yang dihasilkan dengan biaya yang dikeluarkan sudah seimbang.

## Referensi

- Anggara, S. (2016). *Administrasi Keuangan Negara*. CV Pustaka Setia.
- Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Erlangga.
- Farida, A.S., Nugraha, R.F.M. (2019) *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang*. Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara. 11 (2). DOI :10.15575/jpan.v11i2.7644
- Iskandar, A., Amriani T.N., Subekan, A. (2017). Evaluasi atas Implementasi Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) pada Mitra Kerja KPPN Gorontalo dan Marisa. *Jurnal Tata Kelola Akuntabilitas Dan Keuangan Negara*. DOI: 10.28986/jtaken.v2i2.65
- Hartono, B. (2013). *Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer*. PT. Rineka Cipta.
- Kusumadewi, R., Virginia, V. (2018). *Analisis Asep Pemerintah Daerah Kota Bandung*. Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara. 10 (2). DOI :10.15575/jpan.v10i2.7629
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Yogyakarta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Susanti, I. D., Ahyaruddin, M., & Hidayat, M. (2016). Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua ( Saiba ) Dalam Penyajian Laporan Keuangan ( Studi Kasus Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau ). *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau, 1*, 53–59.
- Suwanda, D. (2018). *Sistem Akuntansi Akrua Pemerintah Daerah Berbasis Akrua*. Gramedia.
- Syafri, W. (2012). *Studi Tentang Administrasi Publik*. Erlangga.
- Syukri, A. dan. (2019). Implementasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) pada Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh. *Universitas Syiah Kuala Aceh: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*.